

**UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN
TERTIB ADMINISTRASI PERKANTORAN DI DESA
PERGAJAHAN KAHAN KEC. BINTANG BAYU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan
Universitas Medan Area



OLEH

SUDARIA
12.851.0036

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2016**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM
PELAKSANAAN TERTIB ADMINISTRASI
PERKANTORAN DI DESA PERGAJAHAN
KAHAN KEC. BINTANG BAYU KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI

Nama : SUDARIA
NPM : 12.851.0036

DISETUJUI OLEH :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Drs. H. M. Husni Thamrin, MSi

Anggreni Atmei Lubis, SH, Mhum

Diketahui Oleh

Dekan

Prof. Dr. H.M.Arief Nasution, MA

ABSTRAK

Sudaria, NPM, 12.851.0036. Upaya Pemerintah Desa Dalam pelaksanaan Tertib Administrasi Perkantoran di Desa Pergajahan Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Pergajahan Kahan dalam pelaksanaan tertib administrasi perkantoran. Serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi upaya dalam meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi perkantoran di Desa Pergajahan Kahan Kecamatan Bintang Bayu.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder dipergunakan beberapa teknik yakni wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan para informan dengan menggunakan pedoman wawancara. Sumber-sumber data yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah (1) Kepala Desa Pergajahan Kahan sebagai informan kunci (key informan) (2) Sekretaris Desa. (3) Tiga orang kepala urusan dan para kepala dusun. Observasi yaitu secara langsung masing-masing aparat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari disamping mengamati cara kerja dan hasil kerja mereka. Serta kajian dokumen.

Setelah melakukan penelitian maka diperoleh hasil adanya upaya pemerintahan desa dalam pelaksanaan tertib administrasi perkantoran di desa pergajahan kahan, khususnya administrasi pemerintahan desa yang meliputi antara lain : (a) Pembinaan disiplin pegawai (b) Pendidikan dan pelatihan (c) Motivasi kerja (d) Pengembangan Karir. Hasil penelitian juga menunjukkan kondisi pelaksanaan tugas pemerintahan desa dalam tertib administrasi perkantoran memiliki hambatan dan faktor rendahnya disiplin kerja ditinjau dari aspek waktu, minimnya pemberian bimbingan terhadap aparat, pengawasan dan pengendalian yang baik, efektif serta kondisi kerja yang kurang mendukung.

Kata Kunci : Upaya pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Tertib Administrasi Perkantoran

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil ‘alamin. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi sekalian alam. Skripsi ini berjudul **“Upaya Pemerintah Desa Dalam pelaksanaan Tertib Administrasi Perkantoran di Desa Pergajahan Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai”**. Penulisan skripsi dilaksanakan adalah untuk melengkapi syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana pemerintahan di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan disebabkan masih kurangnya ilmu dan pengalaman yang ada pada penulis, namun berkat taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tanpa bantuan dari semua pihak penulis bukanlah apa-apa, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada orang tua yang telah membesarkan penulis dan mendidik penulis jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, serta menyayangi penulis dengan kasih sayangnya tyang teramat dalam.
2. Bapak prof. Dr. H.A Yakub Matondang MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak prof. Dr. H.M. Arif Nasution, selaku dosen fakultas ISIPOL.

4. Bapak Drs. Usman Tarigan, M. Si Selaku dosen pembimbing Skripsi I yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga bagi penulis dari awal hingga selesai skripsi ini.
5. Ibu Angraini Amel Lubis,SH, M.Hum selaku pembimbing II yang telah mengarahkan serta memberikan bimbingan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Kepala Desa Pergajahan Kahan Kec. Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai dan para staf yang telah mengizinkan penulis dalam mengadakan penelitian tersebut.
7. Dan ucapan terima kasih yang sama kepada semua pihak yang turut membantu yang takbisa penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu hingga selesainya skripsi ini.

Kemudian penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan bimbingan kepada dosen pembimbing untuk perbaikan skripsi ini nantinya, agar dapat menjadi pedoman pada penulisan skripsi.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga skripsi ini dapat bermamfaat untuk penulisan skripsi nantinya, Amin ya Robbal'Alamin.

Medan , April 2016

Peneliti

SUDARIA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Identifikasi Masalah	4
1.3.Pembatasan Masalah.....	4
1.4.Perumusan Masalah.....	4
1.5.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Uraian Teori	6
2.1.1 Pemerintahan Desa	6
2.1.2 Konsep Kemampuan Aparat Desa	8
2.1.3 Konsep Administrasi Pemerintahan Desa	11
2.1.4 Pengertian Administrasi	14
2.1.5 Tertib Administrasi perkantoran	16
2.1.6 Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa	21
2.2 Kerangka Pemikiran.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	26
3.2 Populasi dan Sampel	26
3.3 Teknik Pengumpulan Data	27

3.4 Defenisi Operasional Variabel	28
3.5 Teknik Analisa Data.....	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	30
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	36
4.3 Upaya Pemerintahjan Desa Dalam Pelaksanaan Tertib Administrasi Perkantoran di Desa pergajahan Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai	42

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan.....	52
5.2 Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang multi dimensi secara pengelolaannya melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah bahkan sampai ditingkat desa. Komponen atau aparat dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya. Tepatlah kiranya jika wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam Pembangunan nasional yang menyeluruh.

Mengingat kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintahan terendah tersebut, maka salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu dibangun adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya.

Hal tersebut sangat penting, karena pemerintah desa beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utamaaktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan ketertiban diwilayah kekuasaannya. Karena itu peranan mereka demikian penting dan banyak menuntukan maju mundurnya satu unit pemerintahan. Oleh sebab itu

diperlukan aparat desa yang benar-benar mampudan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Keberadaan aparat desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karna sebagai organ pemerintahan yang paling bawahmengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada diwilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh.

Sehubung dengan hal tersebut diatas, Suryaningrat (1992:108) mengemukakan bahwa “Desa sebagai bahan keterangan dan sumber data dan bahan keterangan yang diperoleh dari desa seringkali digunakan untuk rencana daerah oleh karena itu data buatan atau data keterangan harus dihindarkan karena dapat menggagalkan tujuan Negara”. Dengan demikian aparat desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan.

Berangkat dari pemikiran tersebut, dikaitkan dengan rill sementara Aparat Desa Pergajahan Kahan Kecamatan Bintang Kayu Kab. Serdang Bedagai sebagai tempat penelitian yang direncanakan ini, menurut pengamatan awal penulis, menunjukkan bahwa kemampuan aparat Desa Pergajahan Kahan dalam pelaksanaan tugas terutama dalam menyiapkan bahan dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan perencanaan pembangunan, hasilnya masih minim atau belum terlaksana secara optimal. Hal ini terbukti dari pelaksanaan tugas-

tugas administrasi yang tidak terlaksana dengan baik dan konsisten sesuai ketentuan, baik administrasi umum, administrasi penduduk, maupun administrasi keuangan.

Belum tersedia informasi atau pencatatan administrasi secara baik sebagaimana tersebut diatas, maka hal itu terjadi karena adanya pengaruh berbagai faktor, antara lain terutama faktor kemampuan sumber daya aparat desa sebagai penyelenggara yang belum optimal. Dalam konteks penyelenggaran pemerintahan desa yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, dan mampu meningkatkan daya saing desanya.

Hal tersebut hanya mungkin terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dapat terlaksana dengan baik. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam implementasinya terdapat berbagai permasalahan yang langsung maupun tidak langsung menghambat pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan tersebut. Kapasitas yang masih rendah merupakan bagian dari permasalahan yang ditunjukkan dilapangan. Diantaranya masih belum optimalnya aspek kelembagaan, sumber daya manusia, maupun manajemen pemerintahan desa.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, menurut penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam. Oleh karena itulah penulis membuat judul skripsi **“Upaya Pemerintah Desa Dalam pelaksanaan Tertib Administrasi Perkantoran di Desa Pergajahan Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kualitas yang memiliki perangkat desa yang memadai, baik kemampuan maupun keterampilan dalam bidang administrasi desa.
2. Pembangunan dapat tercapai apabila dimulai dari jajaran terendah yaitu pemerintahan desa.
3. Pelaksanaan administrasi desa dibutuhkan perangkat desa yang berwibawa, kreatif, transparan, peka dan proaktif.
4. Pola kerja yang masih kurang disiplin, baik yang berkaitan dengan tertib administrasi maupun pelaporannya.
5. Belum tertibnya pelaporan administrasi desa kepada perintahan kecamatan.

1.3 Pembatasan Masalah

Mengacu pada pembatas masalah diatas, masalah yang dikaji dibatasi mengenai bagaimana upaya Pemerintahan Desa Pergajahan Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.

1.4 Perumusan Masalah

Agar penulisan ini lebih terfokus maka masalahnya dapat dirumuskan dalam bentuk pernyataan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya pemerintahan dalam pelaksanaan tertib administrasi di Desa Pergajahan Kahan Kec. Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi upaya pemerintahan dalam pelaksanaan tertib administrasi di Desa Pergajahan Kahan Kec. Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - 1) Untuk mengetahui upaya peningkatan kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Pergajahan Kahan.
 - 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Pergajahan Kahan.
2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan sebagai :

- 1) Bahan informasi dan kontribusi pemikiran kepada pemerintahan Desa Pergajahan Kahan dan masyarakat serta kepada semua pihak yang berkepentingan dalam upaya peningkatan pelaksanaan tugas-tugas administrasi desa dan terutama tugas dibidang pencatatan register yang terpenting bagi kebutuhan pembangunan.

- 2) Bahan perbandingan dan informasi awal bagi peneliti lain yang hendak mengkaji secara mendalam tentang pelaksanaan tugas-tugas administrasi desa pada umumnya dan register desa pada khususnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1. Pemerintahan Desa

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik public maupun perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Kepala Desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pamarintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan.

Penyelenggaran Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang didesa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur tugas dan mengurus kepentingan masyarakat. Pemerindah desa dalam manjalankan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan

sinkronisasi. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya pada Bupati tebusan Camat.

Kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris desa.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan perangkat desa, mengadakan pengawasan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang. Apabila terjadi kekosongan perangkat desa, maka Kepala Desa atas persetujuan BPD mengangkat jabatan perangkat desa.

1. Kedudukan Kepala Desa

Kepala desa berkedudukan sebagai berikut :Pemimpin organisasi Pemerintahan Desa

- 1) Pemimpin masyarakat desa
- 2) Hakim perdamaian desa
- 3) Koodinator dan penggerak pembangunan didesa
- 4) Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukumnya.

2. Wenangan Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa

- 2) Membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- 3) Mengadakan kerjasama antar desa untuk kepentingan desa yang diatur dengan keputusan bersama dan melapor kepada Bupati dengan tembusan Camat

3. Kedudukan dan Fungsi Perangkat Desa

Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana yang membantu Kepala Desa, melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi pada seluruh organisasi desa.

2.1.2. Konsep Kemampuan Aparat Desa

Istilah “kemampuan” mempunyai banyak makna, Jhonson dalam (Cece Wijaya,1991:3) berpendapat bahwa “kemampuan adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan”. Sementara itu, menurut Kartono (1993:13) bahwa “kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa”. Lebih lanjut, Syarif (1991:8) menyebutkan beberapa jenis kemampuan yang antara lain : kecerdasan, menganalisis, bijaksana mengambil keputusan, kepemimpinan/kemasyarakatan dan pengetahuan tentang pekerjaan.

Mengacu pada pengertian dan jenis kemampuan tersebut diatas, maka dalam suatu organisasi pemerintahan Desa senantiasa perlu memiliki suatu daya

kemampuan, keterampilan, pengetahuan terhadap pekerjaan dalam mengimplementasikan tugas-tugas dan fungsi masing-masing aparat Desa. Kemampuan yang penulis maksudkan adalah kemampuan yang dilihat dari hasil kerjanya atau kemampuan kerjanya.

Kemampuan kerja seseorang menurut Tjiptoherianto (1993:36) mengemukakan bahwa “kemampuan kerja yang rendah adalah akibat dari rendahnya tingkat pendidikan, dan latihan yang dimiliki serta rendahnya derajat kesehatan”. Sementara itu, menurut Steers dalam (Rasyid,1992:6) bahwa “kemampuan aparatur pemerintah sebenarnya tidak terlepas dari pembicaraan tingkat kematangan aparatur yang didalamnya menyangkut keterampilan yang diperoleh dari pendidikan latihan dan pengalaman”.

Berdasarkan pandangan tersebut jelas bahwa kemampuan seseorang, dalam hal ini aparat desa dapat dilihat dari tingkat pendidikan aparat, jenis latihan yang pernah diikuti dan pengalaman yang dimilikinya. Secara konseptual hal ini diperkuat dari pandangan Steers tersebut sebelumnya bahwa untuk mengidentifikasi apakah Kegiatan dalam organisasi dapat mencapai tujuannya salah satunya yang harus mendapat perhatiannya adalah orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut.

Selanjutnya Steers berpendapat bahwa pada kenyataannya anggota organisasi yang merupakan faktor yang mempunyai pengaruh yang paling penting dalam pencapaian tujuan organisasi disebabkan orang-orang itulah yang menggerakkan roda organisasi. Anggota organisasi yang dimaksud adalah aparat

desa yang merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

Pemerintah Desa memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan *demokratik*, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. Guna mewujudkan tugas tersebut, pemerintah desa dituntut untuk melakukan perubahan, baik dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna, sehingga pemerintah desa benar-benar makin mengarah pada praktek *good local governance*, bukannya *bad governance*.

Peluang untuk menciptakan pemerintahan desa yang berorientasi pada *good local governance* sebenarnya dalam konteks transisi demokrasi seperti yang dialami oleh bangsa Indonesia sekarang terbuka cukup lebar. Hal ini setidaknya didukung oleh kondisi sosial pasca otoritarianisme Ordo Baru yang melahirkan liberalisasi politik yang memungkinkan seluruh elemen masyarakat didesa secara bebas mengekspresikan gagasan-gagasan politiknya. Begitu pula dukungan pemerintahan transisi pasca Ordo Baru dengan membuat regulasi melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan oleh UU No.32 Tahun 2004 yang sedikit lebih maju dibandingkan dengan regulasi sebelumnya dimasa Orde Baru yang syarat dengan menyeragaman dan pengekangan sosial.

Meskipun demikian, adanya perubahan sosial-politik dalam masa transisi demokrasi ini tidak dengan serta merta dapat merubah dalam sekejap wacana dan

kinerja pemerintahan desa kedalam visi demokratisasi dan *good local governance*. Sekalipun stukturanya mengalami perubahan, dimana saat ini pemerintahan desa tidak lagi bercorak korporatis dan sentralistik pada kepemimpinan Kepala Desa, akan tetapi kultur dan tradisi paternalistik yang memposisikan Kepala Desa sebagai orang kuat dan berpengaruh masih begitu melekat dengan kuat. Realitas ini memang tidak dapat dilepaskan sebagai bagian dari proses kontruksi sosial yang begitu mendalam sehingga membuat daya kognitif warga desa seringkali terasa kesulitan dalam membuat terobosan-terobosan baru yang sejalan dengan semangat perubahan ketika berbenturan dengan kebijakan seorang Kepala Desa.

Kondisi ini sedikit banyaknya juga dipengaruhi pula oleh lemahnya *human resources* di desa yang populasinya relatif kecil dan sangat terbatas. Sebab itu guna mendobrak kebekuan atau stagnasi sosial ini diperlukan terobosan dari kekuatan luar untuk bermitra atau saling bekerjasama dengan aktor-aktor dan lembaga-lembaga potensial di desa dalam melakukan perubahan sosial menuju ke arah situasi yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.

2.1.3 Konsep Administrasi Pemerintahan Desa

Sebelum menjelaskan konsep/pengertian administrasi pemerintahan terlebih dahulu perlu dijelaskan konsep “administrasi dan pemerintahan”. Menurut Siagian (1991:2) “Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dewasa ini, Peranan Pemerintahan Desa sebagai struktur perantara, yakni sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintahan dan masyarakat diluar desa tetap dipertahankan, bahkan ditambah dengan peranan lainnya yaitu sebagai agen pembaharuan. Desa atau dengan nama lainnya yang sejenis menurut konstitusi memperoleh perhatian istimewa. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan guna meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan perkataan lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karna adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas Pemerintahan Desanya, sehingga keinginan mempertahankan posisi tawar menawar dengan pihak luar desa yang relatif seimbang dapat terus dipertahankan (Sadu Wasistiano, 2006:4). Lebih lanjut Sadu Wasistiano mengatakan bahwa, tanpa adanya Pemerintahan Desa yang kuat, Desa dengan masyarakat hanya akan menjadi objek permainan ekonomi maupun politik dari pihak-pihak luar desa yang relatif lebih kuat posisinya.

Langkah kongkrit upaya pengembangan Desa antara lain berupa lahirnya Undang-undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan pengganti sebagai peraturan perundangan mengenai pemerintahan desa. Salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 60 tahun 2014 adalah guna memodernisasikan Pemerintahan Desa agar mampu menjalankan tiga

peranan utamanya, yaitu sebagai struktur perantara, sebagai pelayan masyarakat serta agen pembaharuan.

Sebagai konsekuensi negara hukum, perubahan format politik dan sistem pemerintahan harus ditindaklanjuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan dibidang politik dan pemerintahan dengan dilakukannya perubahan pengaturan prlaksana yang mengatur Desa. Uniformitas yang diregulasi oleh UU No. 5 tahun 1979 selama dua dekade, diremorfasi melalui UU No 22 tahun 1999 yang memberikan peluang kehidupan lebih demokrasi pada tataran struktur pemerintahan paling depan tersebut. Selanjutnya dengan diterapkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan akan semakin menyempurnakan paradigma penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa sebagai regulasi yang mengatur tentang Desa setelah setahun berlakunya UU No. 32 Tahun 2004.

Salah satu konsekuensi logis dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, terutama aktivitas Pemerintah Desa sebagai pelayan masyarakat, maka diundangkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa yang membantu aparat dan perangkat Pemerintahan Desa di dalam proses pencatatan data dan informasi berbagai urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2.1.4. Pengertian Administrasi

Secara etimologis, *administrasi* berasal dari bahasa latin *ad+ministrare*, suatu kata kerja yang berarti melayani, membantu, menunjang, atau memenuhi. Istilah ini berasal dari kata benda *administratio* dan kata sifat *administratífus*. Untuk Indonesia yang tepat digunakan istilah administrasi.

Rangkaian kegiatan yang digolongkan sebagai administrasi mencakup: (1) dilakukan oleh sekelompok orang (2 orang atau lebih); (2) berlangsung dalam suatu kerjasama; (3) dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Ketiga faktor inilah yang merupakan tanda pengenal atau ciri khas dari administrasi yang apabila faktor-faktor tersebut disingkat adalah sekelompok orang, kerjasama, dan tujuan tertentu. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kerjasama adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara teratur oleh lebih seseorang yang menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak akan terjadi apabila dilakukan oleh masing-masing seorang diri.

Administrasi diartikan sebagai suatu proses tata kerja penyelenggaraan atau dengan perkataan lain sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara teknis. (www.theceli.com/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=23-) Administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan sekelompok orang dalam suatu usaha kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Administrasi adalah proses penyelenggaraan kegiatan untuk mewujudkan rencana/keputusan yang telah dibuat agar menjadi kenyataan, dengan cara mengatur kerja dan mengarahkan orang-orang yang melaksanakannya. (www.bpkpenabur.or.id/jurnal/02/035-045.pdf).

Administrasi juga dapat diartikan sebagai :

1. Suatu aktivitas yang terutamabersangkutan dengan cara untuk menyelenggarakan tujuan yang telah ditentukan semula;
2. Suatu proses lazim terdapat dalam segenap usaha bersama, baik usaha berskala besar maupun kecil-kecilan;
3. Suatu proses pengorganisasian dan bimbingan orang-orang agar dapat melaksanakan suatu tujuan khusus;
4. Suatu proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

(Syafiie,Tanjung,Modeong,1999:17)

Ada dua persepektif umum mengetahui ruang lingkup dari administrasi. Perspektif yang pertama adalah perspektif makro yang meliputi proses penentuan tujuan, alokasi sumber daya, dan koordinasi kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi. Penekanan dari perspektif ini terutama pada aspek filosofis tentang apa tujuan dan makna kehidupan, apa tujuan yang kita inginkan dan bagaimana mencapainya, serta bagaimana seharusnya orang berperilaku. Pertspektif selanjutnya adalah perspektif mikro, yang menerangkan perilaku administrasi sebagai sikap, pendekatan, persepsi, dan nilai-nilai yang dianut oleh para administrator. Stephen P. Robbins (1976) mengatakan bahwa prilaku administrsi dipengaruhi oleh sejarah organisasi, norma-norma pendidikan, dan pengalaman.

2.1.5 Tertib Administrasi Perkantoran

Administrasi Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Buku Administrasi Desa. Jenis dan bentuk Administrasi Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006:

- a. Administrasi umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum, terdiri dari:
 1. Buku Data Peraturan Desa;
 2. Buku Data Keputusan Kepala Desa;
 3. Buku Data Inventaris Desa;
 4. Buku Data Aparat Pemerintah Desa;
 5. Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa;
 6. Buku Data Tanah di Desa;
 7. Buku Agenda; dan
 8. Buku Ekspedisi.

- b. Administrasi penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk, terdiri dari:
 1. Buku Data Induk Penduduk Desa;
 2. Buku Data Mutasi Penduduk Desa
 3. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan; dan

4. Buku Data Penduduk Sementara.
- c. Administrasi keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada Buku Administrasi Keuangan, terdiri dari:
1. Buku Anggaran Penerimaan;
 2. Buku Anggaran Pengeluaran Rutin;
 3. Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan;
 4. Buku Kas Umum;
 5. Buku Kas Pembantu Penerimaan;
 6. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin; dan
 7. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan.
- d. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
1. Buku Rencana Pembangunan;
 2. Buku Kegiatan Pembangunan;
 3. Buku Inventaris Proyek; dan
 4. Buku Kader-Kader Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan BPD adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD, terdiri dari:
1. Buku Data Anggota BPD;
 2. Buku Data Keputusan BPD;

3. Buku Data Kegiatan BPD;
4. Buku Agenda BPD; dan
5. Buku Ekspedisi BPD.

Rangkaian kegiatan yang digolongkan sebagai administrasi mencakup: (1) dilakukan oleh sekelompok orang (2 orang atau lebih); (2) berlangsung dalam suatu kerjasama; (3) dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Ketiga faktor inilah yang merupakan tanda pengenal atau ciri khas dari administrasi yang apabila faktor-faktor tersebut disingkat adalah sekelompok orang, kerjasama, dan tujuan tertentu. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kerjasama adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara teratur oleh lebih seorang yang menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak akan terjadi apabila dilakukan oleh masing-masing seorang diri.

Administrasi adalah proses proses penyelenggaraan kegiatan untuk mewujudkan rencana/kaputusan yang telah dibuat agar menjadi kenyataan, dengan cara mengatur kerja dan mengarahkan orang-orang yang melaksanakannya. Administrasi juga dapat diartikan sebagai :

1. Suatu aktifitas yang terutama bersangkutan dengan cara untuk menyelenggarakan tujuan yang telah ditentukan semula;
2. Suatu proses lazim terdapat dalam segenap usaha bersama, baik usaha berskala besar maupun kecil-kecilan;
3. Suatu proses dan pengorganisasian dan bimbingan orang-orang agar dapat melaksanakan suatu tujuan khusus;

4. Suatu proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. (Syafie, Tanjung, Modeong, 1999:17).

Berdasarkan pengertian tersebut dan apabila dikaitkan dengan aktifitas ditingkat desa, maka berbicara tentang administrasi desa berarti yang dimaksud dengan “administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan desa untuk mencapai tujuan pemerintahan, seperti antara lain, baik dalam penggerakkan partisipasi dalam pembangunan dan terwujudnya demokrasi Pancasila secara nyata guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Mengacu pada pengertian diatas berarti konsep administrasi terbagi dalam dua pengertian yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luar. Administrasi dalam arti luas berarti segenap proses kegiatan untuk mencapai tujuan sedangkan administrasi dalam arti sempit adalah segenap penyelenggaraan kegiatan tulis menulis, Surat menyurat, beserta penyimpanan, pengurusan masalah-masalah dan segala pencatatannya dilaksanakan oleh aparat dalam arti pencapaian tujuan (Widjaya,1992:88).

Selanjutnya konsep/pengertian pemerintah dan pemerintahan dalam kajian sistem pemerintahan Indonesia, pemerintahan dibedakan dengan istilah pemerintahan. Menurut Saparin (1992:21) untuk membedakan pengertian kedua konsep tersebut, maka perlu diterangkan secara etimologis, yaitu :

- a. Pemerintah adalah kata nama subjek yang berdiri sendiri, contoh Pemerintah Daerah.

- b. Pemerintah adalah kata jadian yang disebabkan karena subjeknya mendapat akhiran “an” yang artinya pemerintah sebagai subjek melakukan tugas-tugas atau kegiatan, dimana cara melakukan kegiatan itu disebut pemerintahan.

Ada dua persepektif umum mengenai ruang lingkup dari administrasi. Perspektif yang pertama adalah perspektif makro yang meliputi proses penentuan tujuan, alokasi sumber daya, dan koordinasi kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi. Penekanan dari perspektif ini terutama pada aspek filosofis tentang apa tujuan dan makna kehidupan, apa tujuan yang kita inginkan dan bagaimana mencapainya, serta bagaimana seharusnya orang berperilaku. Perspektif selanjutnya adalah perspektif mikro, yang menerangkan perilaku administrasi sebagai sikap, pendekatan, persepsi, dan nilai-nilai yang dianut oleh para administrator. Stephen P. Robbins (1976) mengatakan bahwa perilaku administrasi dipengaruhi oleh sejarah organisasi, norma-norma pendidikan, dan pengalaman.

Dari uraian diatas nampak istilah pemerintah menunjukan kepada aparat yaitu para pelaksana pemerintahan, sedang istilah pemerintahan menunjuk pada aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini berarti “Pemerintahan” adalah keseluruhan tindakan atau kegiatan aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.1.6 Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

Mengingat unit pemerintahan desa adalah bagian integral dari pemerintahan nasional, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi pemerintah desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pada pasal 127 tentang tugas pokok Kepala Desa yaitu :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa
- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Pelayanan masyarakat
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Menurut Zainun (1990:3-5) terdapat empat kunci pokok tugas dan fungsi administrasi dan manajemen pemerintahan Indonesia yaitu :

- (1) Perumusan dan penetapan kebijakan umum,
- (2) Kepemimpinan,
- (3) Pengawasan,
- (4) Koordinasi.

Keempat fungsi administrasi dan manajemen ini akan diterapkan pada setiap tingkat pemerintahan yang ada dalam susunan pemerintahan negara Republik Indonesia. Berdasarkan tugas fungsi pemerintahan tersebut, berarti pemerintahan desa sebagai bagian integral dari pemerintahan nasional juga menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut meskipun dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Oleh unit

pemerintahan desa seperti halnya pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terendah mempunyai 3 fungsi pokok yaitu :

1. Pelayanan kepada masyarakat
2. Fungsi operasional atau manajemen pembangunan,
3. Fungsi ketatausahaan atau registrasi (Sawe,1996:99)

Keseluruhan tugas dan fungsi administrasi pemerintah desa tersebut, tidak akan terlaksana dengan baik, manakala tidak ditunjang dari aparatnya dengan melaksanakan sebaik-baiknya apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing aparat. Menyadari betapa pentingnya tugas administrasi pemerintahan desa, maka yang menjadi keharusan bagi Kepala Desa dan aparatnya adalah berusaha untuk mengembangkan kecakapan dan keterampilan mengelolah organisasi pemeritahan desa termasuk kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selanjutnya menurut Beratha (1992:37) mengemukakan bahwa tugas pemerintah desa termasuk dalam menjalankan administrasi adalah :

- a. Tugas bidang pemerintahan.
- b. Tugas bidang pelayanan Kepala masyarakat.
- c. Tugas bidang ketatausahaan.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang tugas-tugas administrasi pemerintahan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- I. Tugas bidang pemerintahan, meliputi :
 1. Registrasi

Registrasi dilakukan dalam berbagai buku register mengenai berbagai hal dan peristiwa yang menyangkut kehidupan tindakan masyarakat berdasarkan laporan yang diperoleh melalui sub pelayanan umum dari masyarakat yang berkepentingan.

2. Tugas-tugas umum meliputi : menerima dan melaksanakan instruksi-instruksi dan petunjuk-petunjuk dari pemerintahan kecamatan dan pemerintah kabupaten mengenai pemerintahan, tugas-tugas teknis, ketertiban, kesejahteraan dan keamanan,
3. Membuat laporan periodik mengenai keadaan dan perubahan penduduk, keamanan serta sosial ekonomi.
4. Melaksanakan hal-hal yang sudah menjadi keputusan ditingkat desa.
5. Melaksanakan kerjasama dengan instansi ditingkat Desa dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan tanah

II. Tugas bidang pelayanan umum, meliputi

1. Pemberian bermacam-macam izin, seperti izin tempat tinggal, izin meninggalkan desa, izin usaha dan izin pendirian pembangunan.
2. Memberikan macam-macam keterangan seperti : bukti diri, keterangan catatan kepolisian dan sebagainya.

III. Tugas bidang ketatausahaan, meliputi :

Dokumentasi data, keadaan wilayah, laporan keuangan dan lain-lain. Sementara itu, menurut instruksi Mendagri Nomor 21 Tahun 1992, pada pasal (2) ditegaskan bahwa “desa mempunyai tugas melakukan

penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah wilayahnya”.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut (pasal 2) Desa mempunyai fungsi (pasal 3), yaitu :

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat.
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan Ketentraman dan ketertiban wilayah.
- e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada pemerintah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi desa tersebut, selanjutnya dijabarkan menjadi tugas dan fungsi masing-masing unsur aparat baik Kepala Desa maupun aparatnya yang terdiri dari : Sekretaris, Kepala-Kepala Urusan, Kepala-Kepala Lingkungan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Steers berpendapat bahwa pada kenyataannya anggota organisasi yang merupakan faktor yang mempunyai pengaruh yang paling penting dalam

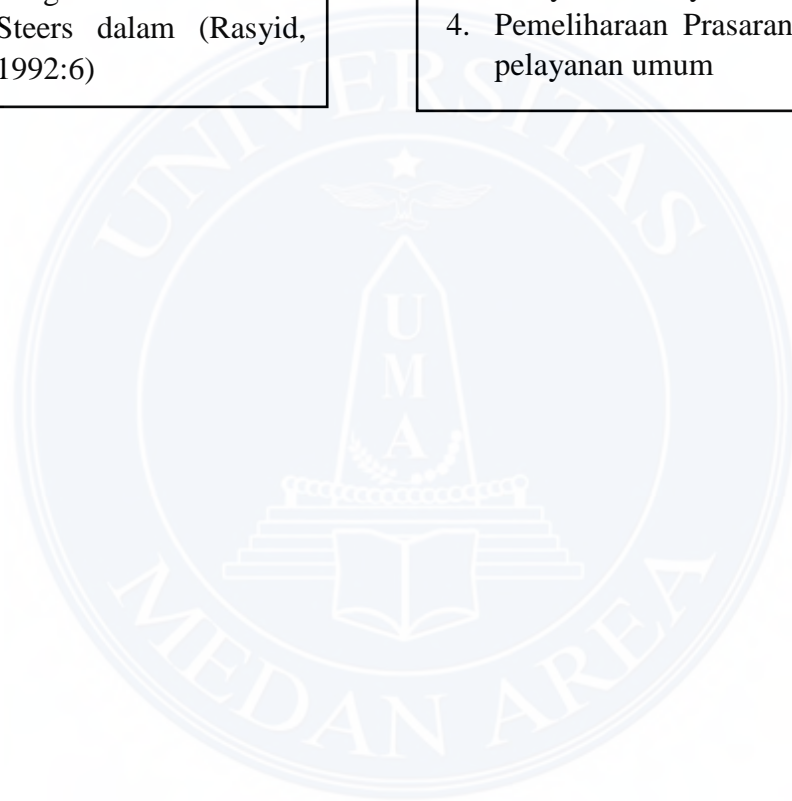
pencapaian tujuan organisasi disebabkan orang-orang itulah yang menggerakkan roda organisasi. Oleh karena itu dapat dilihat kerangka pikir sebagai berikut:

Kemampuan Aparat Desa
Dalam Meningkatkan :

1. Keterampilan
 2. Pendidikan
 3. Pelatihan
 4. Pengalaman
- Steers dalam (Rasyid, 1992:6)

Pelaksanaan Tertib Administrasi
Perkantoran

1. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa
2. Pemberdayaan Masyarakat
3. Pelayanan Masyarakat
4. Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas pelayanan umum



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Pergajahan Kahan Kecamatan Bintang Bayu. Penentuan lokasi ini antara lain didasarkan atas pertimbangan bahwa di desa ini penyelenggaraan administrasi pemerintahan seperti pencatatan register, belum terlaksana dengan baik sesuai format dan ketentuan yang telah ditetapkan. Terkait dengan pertimbangan tersebut juga karena Desa Pergajahan Kahan merupakan desa yang dekat dengan ibu kota kecamatan dan seharusnya menyelenggarakan administrasi pemerintahannya dengan lebih baik, namun kenyataannya tidak demikian.

3.2 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sogiyono,2005:90).

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sogiyono,2005:90). Adapun sampel yang diambil menggunakan teori Slovin. Dengan demikian jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 orang.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi 1 (satu) orang Sekretaris Desa, 5 (lima) orang Kepala Urusan dan 3 (tiga) orang Kepala Dusun, maka kami menetapkan Kepala Desa Pergajahan Kahan sebagai informan kunci (*key informan*).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, dipergunakan beberapa teknik :

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya-jawab langsung dengan para informan, dengan menggunakan pedoman wawancara.

Sumber-sumber data yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa Pergajahan Kahan sebagai informan kunci (*key informan*).
 2. Sekretaris Desa
 3. Tiga orang Kepala Urusan dan
 4. Para Kepala Dusun
2. Observasi, yaitu secara langsung mengamati objek yang menjadi kajian, terutama mengawasi secara langsung masing-masing aparat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari disamping mengamati cara kerja dan hasil kerja mereka.
 3. Kaji Dokumen, yaitu menelaah dokumen-dokumen laporan hasil pelaksanaan tanggung jawab masing-masing aparat.

3.4 Defenisi Operasional Variabel

Yang dimaksud dengan upaya pemerintahan desa dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan tertib administrasi perkantoran pemerintahan dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah dirumuskan oleh pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat untuk mencapai tujuan keberhasilan pembangunan Desa Pergajahan Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.

Kebijakan Desa, strategi utama peningkatan kapasitas dalam kelembagaan meliputi : aspek keuangan, dan aspek sumber daya manusia apratur perangkat desa, aspek sumberdaya pejabat fungsional widyaiswara yang mampu untuk mengampu materi Kebijakan Desa. Strategi lain adalah perumusan wewenang yang jelas antara antar lembaga dalam kebijakan desa. Terprogramnya kegiatan pelatihan sosialisasi berkesenambungan tentang Penyusun Kebijakan Desa yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten serta tersusunnya modul-modul yang berkaitan dengan Perumusan Kebijakan.

Kepemimpinan Kepala Desa, strategi yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan dalam penguasaan seni dan teori kepemimpinan, selain itu kemampuan dalam menyusun peraturan daerah; kemampuan dalam pengambilan keputusan Kemampuan dalam negosiasi; dan kemampuan dalam manajemen konflik.

Manajemen Pelayanan Desa, sebagai strategi untuk meningkatkan kapasitas aparat desa dalam bidang pelayanan kepada masyarakat diantaranya adalah perlu

adanya peningkatan kemampuan aparat desa dalam merumuskan program-program pelayanan. Selain itu peningkatan kemampuan dalam mengelola pelayanan termasuk pengetahuan teknis administratif (format-format pelayanan administrasi dst) dan kemampuan memahami petunjuk maupun peraturan undang-undang yang mendukung aparatur desa dalam memberikan pelayanan, selain kemampuan teknis menunjang (mengoperasikan komputer dll).

3.5 Teknis Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan langkah yang sangat kritis dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, karena dari analisis data itulah akan didapatkan arti dan makna dalam memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti. Data yang terkumpul selama peneliti melakukan penelitian, akan diklasifikasi, dianalisis dan diinterpretasikan secara mendetail, teliti dan cermat untuk memperoleh kesimpulan yang lebih obyektif dari suatu penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan informasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarin, Tatang M. 1990. *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali Press Jakarta.
- Beratha, I Nyoman. 1992. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Hnadayaningrat, Soewarno, 2001. *Pengantar Ilmu Study Administrasi dan Manajemen*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta.
- Kartono, Kartini. 1993. *Pemerintahan dan Kepemimpinan*. Rajawali Press. Jakarta.
- Sawe, Jamaluddin. 1996. *Konsep Dasar Pembangunan Pedesaan*. APDN Press. Bandung.
- Saparin, Sumber. 1996. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Siagian, SP. 1991. *Administrasi Pembangunan*. Haji Masagung. Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 1984. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta.
- Sugwigyo, 2003. *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*, Bina Cipta, Bandung.
- Sugiono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta, Bandung.
- Syarif, Roesli. 1991. *Teknik Manajemen Latihan dan Pembinaan*. Bina Aksara. Bandung.
- Tjiptoherianto, Prijono. 1993. *Pembangunan Sumber Daya Manusia*. Prisma. Jakarta.
- Widjaya, AW. 1992. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Rajawali Press. Jakarta.
- Yulianti, 2003. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Jakarta : LP3ES